

## **PENGARUH INVESTASI SWASTA DAN BELANJA MODAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI BALI**

**Kadek Visala Hari<sup>1</sup>  
I Gusti Bagus Indrajaya<sup>2</sup>**

*<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia*

### **ABSTRAK**

Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* dan merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Masih terdapat ketimpangan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota di Provinsi Bali terutama di wilayah metropolitan Sargabita dengan wilayah di luarnya. Tujuan penelitian ini adalah (1) Menganalisis pengaruh investasi swasta dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. (2) Menganalisis pengaruh investasi swasta, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. (3) Mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh investasi dan belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder, dengan 45 jumlah pengamatan dan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis jalur (*path analysis*) Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Investasi swasta tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi memiliki hubungan yang positif, sedangkan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. (2) Investasi swasta, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. (3) Pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak memediasi pengaruh investasi swasta terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Kata kunci: *investasi swasta, belanja modal, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat*

### **ABSTRACT**

Social welfare is one of the goals from *Sustainable Development Goals*. Inequality still occurs of province Bali, especially in the Sargabita area with regions outside it. The objectives of this study are (1) Analyz of private investment and capital expenditure on economic growth in Bali Province. (2) Analyz of private investment, capital expenditure and economic growth on social welfare in Bali Province. (3) Determine whether economic growth mediates effect of investment and capital expenditure on the social welfare in Bali Province. The used are secondary data, with 45 observation. The analysis technique is path analysis. The results of the study (1) Private investment no effect of economic growth but has a positive related, spending capital expenditure has a positive and significant on the economic growth of Bali Province (2) Private investment, capital expenditure and economic growth directly have a positive and significant effect on the welfare of Bali Province. (3) Economic growth is an intervening variable the influence of capital expenditure on community welfare, economic growth is not an intervening variable the effect of private investment on the welfare of Bali Province.

*Keywords: private investment, capital expenditure, economic growth, social welfare*

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi merupakan upaya atau proses perencanaan untuk membuat perubahan agar tercipta kualitas hidup serta tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat. Menurut Saragih (2009) pembangunan yang baik terjadi apabila pemerintah, pihak swasta dan masyarakat memiliki pola kemitraan yang baik satu sama lainnya. Artinya bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengelola sumberdaya yang ada di daerah tersebut serta membentuk suatu kemitraan antara pemerintah daerah dengan pihak swasta dengan tujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru serta merangsang kegiatan perekonomian di daerah tersebut.

Menurut Todaro (2006) pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan standar hidup setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi dan pendidikan serta menciptakan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri setiap orang melalui pembentukan sistem sosial, politik dan ekonomi. Menurut Awandari (2016) tujuan dari pembangunan pada dasarnya adalah untuk memperluas kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jyanthi dan Arka (2019) meyakini bahwa pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan atau menciptakan keadilan, pemerataan, tidak adanya ketimpangan pembangunan baik antar daerah, antar sub daerah maupun antar warga, memberdayakan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan, menciptakan serta menambah lapangan pekerjaan. Pembangunan juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah dan menjaga kelestarian sumber daya alam agar bisa dimanfaatkan oleh generasi

sekarang maupun yang akan datang serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Todaro dan Smith (2004) menyatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan ekonomi dapat diukur dengan tiga nilai pokok diantaranya 1) Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, 2) Meningkatnya rasa harga diri masyarakat sebagai manusia, dan 3) Meningkatnya kemampuan manusia untuk memilih yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi adalah kegiatan suatu negara atau daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Stanton (2007) tujuan akhir dari pembangunan ekonomi adalah peningkatan kualitas hidup manusia. Peningkatan kualitas hidup manusia sebagai suatu proses perluasan pilihan manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, penghasilan, dan pekerjaan. Oleh karena itu, suatu negara khususnya Indonesia dan suatu daerah khususnya Bali ingin mencapai salah satu tujuan akhir pembangunan tersebut.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan masyarakat. Menurut Tara dan Kusreni (2014) kesejahteraan masyarakat merupakan sistem yang mencakup program atau layanan yang membantu seseorang untuk mendapatkan akses terhadap kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan menjadi cerminan dari keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh

pemerintah. Tolak ukur yang digunakan oleh berbagai Negara termasuk Indonesia untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 serta di buplikasi secara tahunan oleh *Human Development Report*. Menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) dan BPS (2019) indeks pembangunan manusia digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat bisa merasakan hasil pembangunan dengan megacu pada pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup yaitu memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Secara nasional, kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali yang diukur menggunakan nilai IPM menempati urutan kelima dengan nilai sebesar 74,80 pada tahun 2018 berada di bawah Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau, nilai IPM tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Bali masih berada pada indeks pembangunan manusia dengan kategori sedang (*medium human developmet*). Provinsi Bali memiliki 8 kabupaten dan 1 kota dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang berbeda-beda. Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa masih terdapat disparitas atau kesenjangan kesejahteraan masyarakat antara wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (wilayah Sarbagita) dengan wilayah Buleleng, Jembrana, Bangli, Klungkung dan Karangasem (wilayah di luar Sarbagita).

**Tabel 1**      **Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2014-2018**

Kabupaten/ Kota	Indeks Pembangunan Manusia (poin)				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jembrana	68,67	69,66	70,38	70,70	71,65
Tabanan	72,68	73,54	74,19	74,90	75,45
Badung	77,98	78,86	79,80	80,50	80,87
Gianyar	74,29	75,03	75,70	76,10	76,610
Klungkung	68,30	68,98	69,31	70,10	70,90
Bangli	65,75	66,24	67,03	68,20	68,96
Karangasem	64,01	64,68	65,23	65,60	66,49
Buleleng	69,19	70,03	70,65	71,10	71,70
Denpasar	81,65	82,24	82,58	83,00	83,30
<b>Provinsi Bali</b>	<b>72,50</b>	<b>73,30</b>	<b>73,70</b>	<b>74,30</b>	<b>74,80</b>

Sumber: *Badan pusat Statitik Provinsi Bali 2019*

Kota Denpasar yang menjadi pusat kota Provinsi Bali menempati urutan pertama dengan nilai IPM sebesar 83,30 poin pada tahun 2018 sehingga berada diatas kabupaten lainnya di Provinsi Bali. kondisi tersebut menjadikan Kota Denpasar masuk kedalam kategori IPM sangat tinggi. IPM dengan kategori sangat tinggi juga dimiliki oleh di Kabupaten Badung dengan nilai IPM sebesar 80,87 poin pada tahun 2018 selanjutnya diikuti oleh kabupaten-kabupaten dengan kategori tinggi seperti Gianyar dengan nilai IPM 76,61 poin, Tabanan dengan nilai IPM 75,45 poin, Buleleng dengan nilai IPM 71,70 poin, Jembrana dengan nilai IPM 71,65 poin, Klungkung dengan nilai IPM 70,90 poin, serta kabupaten dengan kategori sedang yaitu Bangli dengan nilai IPM 68,96 poin dan karangasem dengan nilai IPM 66,49 poin.

Perbedaan kondisi kesejahteraan masyarakat yang dialami oleh setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali bisa dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Menurut *United Nations Development Programme*

(1990) kesejahteraan masyarakat dapat di pengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dimana, pertumbuhan ekonomi sangat berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka pendapatan perkapita masyarakat akan meningkat sehingga akses terhadap kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Menurut Imron (2018) pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang berperan penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dapat meningkat apabila diikuti dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang senantiasa menunjukkan tren positif. Menurut Ramirez (2000) terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama juga dinyatakan dalam penelitian Mirza (2012) dimana pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Artana (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat.

Selain pertumbuhan ekonomi, menurut Suciati (2015) dan Awandari (2016) kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi oleh investasi yang dilakukan oleh pihak swasta maupun pemerintah. Kegiatan menanamkan modal akan menghasilkan investasi yang nantinya akan menghasilkan tambahan stok modal (*capital stock*). Kegiatan investasi swasta yang di dalamnya terdapat penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat, dimana dengan adanya investasi swasta tersebut diharapkan dapat meningkatkan tambahan stock modal dalam

produksi, meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan.

Dalam teori investasi Harrod-Domar (Subandi, 2016) menyatakan bahwa investasi atau pembetulan modal menjadi hal penting dalam pertumbuhan ekonomi, pembetulan modal ini diperoleh dari akumulasi tabungan. Pada kegiatan investasi terdapat hubungan yang erat kaitannya dengan penciptaan tambahan stock modal dalam masyarakat sehingga dapat meningkatkan produksi baik barang maupun jasa dalam masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat sehingga masyarakat bisa mengakses komponen kesejahteraan masyarakat yaitu pendapatan, kesehatan dan pendidikan.

Menurut Taufik (2014) investasi yang mempunyai *multiplier effect* akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, yang diukur melalui kenaikan pendapatan. Artinya apabila pendapatan meningkat, akan berdampak pada meningkatnya jumlah barang dan jasa yang akan dikonsumsi. Fenomena yang terjadi saat ini adalah ketidak seimbangan investasi swasta antara wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan yang sering di sebut wilayah metropolitan Sarbagita dengan wilayah di luar Sarbagita seperti Jembrana, Buleleng, Klungkung, Bangli dan Karangasem. ini terjadi karena pembangunan infrastruktur yang tidak merata antara kedua wilayah tersebut serta kurang memadainya sarana dan prasarana yang meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan dan transportasi di wilayah diluar Sarbagita sehingga investor tidak tertarik menginvestasikan modalnya di wilayah di luar sarbagita.

Kondisi-kondisi tersebut tentu akan berakibat pada banyaknya penduduk yang melakukan urbanisasi ke wilayah Sarbagita untuk bisa mendapatkan pekerjaan serta pendapatan. Sebagai dampaknya sebagian investasi swasta hanya terpusat di beberapa daerah, bahkan ada beberapa daerah yang mempunyai tingkat investasi yang sangat rendah. Para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri hanya menilai daerah-daerah yang mempunyai potensi atau keuntungan yang menjanjikan yang akan dijadikan sebagai tempat untuk berinvestasi (Kunle *et all*, 2014). Menurut Sumarto (2014) ketimpangan dan kesenjangan yang terjadi di Indonesia diakibatkan oleh sumber daya manusia, perubahan demografi, pengangguran dan migrasi sehingga mengakibatkan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak merata.

Disamping pihak swasta dengan investasi swastanya, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam kesejahteraan masyarakat. Menurut Baeti (2013) pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan., untuk menghasilkan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan upaya-upaya seperti membuat fasilitas kesehatan, pendidikan serta penyediaan lapangan pekerjaan.

Menurut Arsyad (2015) kesejahteraan masyarakat suatu negara atau daerah sangat dipengaruhi oleh kebijakkan-kebijakan internal negara atau daerah terkait aspek pembangunan tersebut. Kebijakan-kebijkan yang dapat mendukung aspek tersebut dapat dilihat melalui seberapa besar proporsi anggaran pemerintah yang dilokasikan untuk pembangunan kesehatan dan pendidikan. Besarnya



proporsi anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk kedua sektor tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakatnya.

Pemerintah melakukan pengeluaran atau belanja modal yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dalam hal ini pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor publik yang lebih penting dan menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada indeks pembangunan manusia. Disamping itu, belanja modal juga ditujukan untuk pengadaan fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan sehingga masyarakat bisa dengan mudah mengakses komponen dari kesejahteraan masyarakat tersebut.

Pendidikan dan kesehatan masyarakat merupakan faktor dominan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal yang sama juga disampaikan oleh Meylina dkk (2013) dimana pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan merupakan dua dari beberapa faktor yang mempengaruhi pembangunan manusia dalam hal ini untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rostow dan Mugrave dalam (Subandi 2016:47) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk

aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat. Setiawan (2015) menyatakan belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Disamping pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, pengeluaran pemerintah juga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi seperti penelitian yang dilakukan oleh Chinweoke dan Okeoma (2014) yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria.

Dalam ekonomi makro, investasi dan pengeluaran pemerintah disamping mempengaruhi kesejahteraan masyarakat juga berperan sebagai salah satu komponen dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Investasi dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif dengan PDRB. PDRB dalam harga konstan menjadi salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi, jadi jika investasi dan pengeluaran pemerintah naik, maka pertumbuhan ekonomi akan naik, begitu juga sebaliknya, saat investasi dan pengeluaran pemerintah turun maka pertumbuhan ekonomi akan ikut turun.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, tidak heran apabila Denpasar bisa memiliki nilai IPM dengan kategori sangat tinggi karena jika dilihat dari belanja modalnya, pemerintah Denpasar dan pemerintah Badung mengalokasikan rata-rata pendapatannya untuk belanja modal selama 5 tahun terakhir sebesar 269 milyar dan 1 triliun, disamping itu Kota Denpasar sebagai pusat kota Provinsi Bali dan Kabupaten Badung sebagai pusat industri pariwisata Provinsi Bali menjadi sasaran para investor atau pemilik modal

untuk menginvestasikan modalnya disana. Sehingga ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar yang tumbuh rata-rata sebesar 6,7 persen dan Kabupaten Badung rata-rata sebesar 6,8 persen.

Kondisi yang berbeda dialami oleh kabupaten dengan kategori sedang yaitu Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem. Dimana anggaran pemerintah untuk belanja modal Kabupaten Bangli dan Kabupaten Karangasem rata-rata selama 5 tahun sebesar 165 milyar dan 185 milyar. Disamping itu para investor kurang tertarik menanamkan modalnya disana. Kondisi-kondisi tersebutlah yang diduga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat antar wilayah di Provinsi Bali. Oleh karena itu, timbulkan minat dan ketertarikan untuk melakukan studi mengenai “pengaruh investasi swasta dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dibuat tujuan dari penelitian sebagai berikut ; (1) Untuk menganalisis pengaruh langsung investasi swasta dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali; (2) Untuk menganalisis pengaruh langsung investasi swasta, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali; (3) Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi memediasi pengaruh investasi dan belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kabupaten/kota Povinsi Bali, lokasi ini dipilih karena berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali tahun 2019 bahwa kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih terdapat kesenjangan atau disparitas kesejahteraan masyarakat antara wilayah metropolitan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) dengan wilayah diluar Sarbagita terutama wilayah timur Bali yang mempunyai nilai IPM terendah diantara wilayah Bali lainnya setiap tahunnya. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik analisis jalur dengan menggunakan program SPSS. Tujuan penggunaan analisis ini adalah untuk mengetahui pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel eksogen dan variabel endogen melalui variabel mediasi. Pengaruh investasi swasta, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diilustrasikan seperti Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1 dapat dirumuskan dua persamaan regresi yang menunjukkan hubungan antar variabel, yaitu.

Persamaan substruktural I

$$Y_1 = b_1X_1 + b_2X_2 + e_1 \dots\dots\dots (1)$$

Persamaan substruktural II

$$Y_2 = b_3X_1 + b_4X_2 + b_5Y_1 + e_2 \dots\dots\dots (2)$$

Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan pada gambar dibawah ini dan lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya. Investasi swasta memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada umumnya didukung oleh peningkatan investasi yang merupakan tambahan *stock modal*. Hal ini didukung oleh teori investasi Harrod-Domar yang menyatakan bahwa investasi atau pembentukan modal menjadi hal penting dalam pertumbuhan ekonomi, pembentukan modal ini diperoleh dari akumulasi tabungan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, dari Taufik (2014) menyatakan bahwa investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena investasi mejadi salah satu faktor yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Hasil penelitian lainnya oleh Irsania and Noveria (2014) mengatakan bahwa investasi langsung asing, memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Arus masuk modal asing yang merupakan bagian dari investasi swasta dapat menimbulkan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara sedang berkembang termasuk Indonesia (Kuncoro, 2010). Investasi swasta sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan asing, investasi ini diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan investasi akan meningkatkan produktivitas dan kualitas serta kapasitas produksi yang pada gilirannya dapat

meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Investasi menjadi salah satu indikator yang digunakan untuk melihat kesempatan kerja dan kesejahteraan di suatu daerah. Besar kecilnya investasi yang terjadi di masyarakat akan mempengaruhi besar kecilnya kesempatan kerja yang tercipta dalam masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat bisa meningkat dan akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang merupakan komponen dari kesejahteraan masyarakat bisa di capai.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Suciati (2015) investasi swasta memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dikabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2007-2012. Penelitian lainnya oleh Wiharjo (dalam Awandari, 2016) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara investasi swasta dengan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Ardhana (2016) menyatakan investasi swasta memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Utara. Hal ini diperkuat lagi melalui penelitian Krismajaya dan Dewi, Krismajaya dan Dewi (2019) menyatakan bahwa investasi swasta berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dimana hubungan ini sering disebut dengan istilah partial mediator.

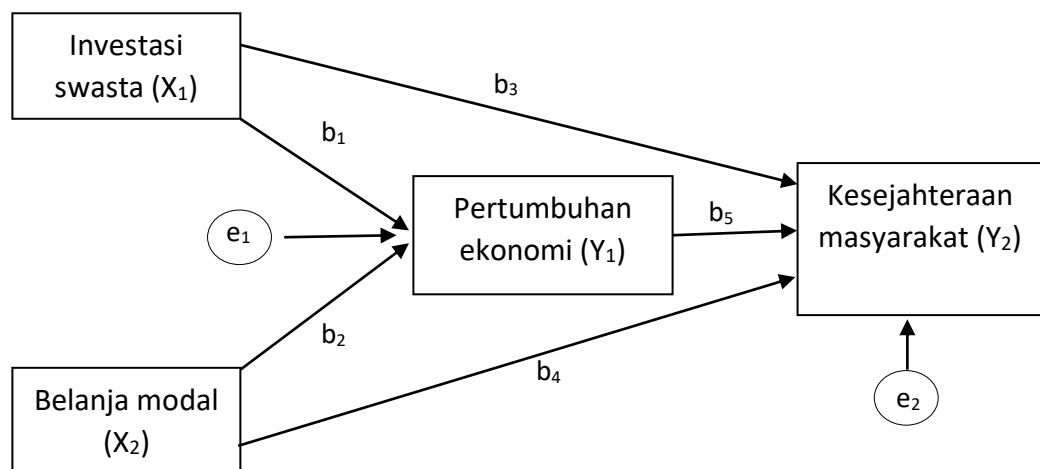
Selain investasi, belanja modal yang bisa disebut sebagai investasi dari pemerintah mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pengadaan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas lainnya yang menjadi dasar kegiatan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, yang dilakukan oleh Chinweoke dan Okeoma (2014) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah

dalam belanja modal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria. Hasil penelitian lainnya oleh Krismajaya dan Dewi (2019) menyatakan bahwa belanja modal daerah berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Pengeluaran pemerintah melalui belanja modal dapat merangsang pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui penyediaan prasarana dan pelayanan fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, oleh Setiawan (2015) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Rustariyuni (2014) belanja modal daerah berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di sembilan kabupaten/kota Provinsi Bali.

Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang sering dikaitkan dengan pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah sasaran dalam pembangunan. Salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan perkapita, selain itu pertumbuhan ekonomi juga berkaitan erat dengan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat, sehingga semakin tinggi pendapatan perkapita di suatu daerah serta semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi maka akses terhadap komponen kesejahteraan masyarakat akan meningkat, seperti pendidikan dan kesehatan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Rustariyuni (2014) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di sembilan kabupaten/kota Provinsi Bali. Selain itu, hasil penelitian lainnya oleh

Mirza (2012) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, begitu juga dengan penelitian Ramirez (dalam Setiawan, 2015) menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dengan kesejahteraan masyarakat.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual Pengaruh Investasi Swasta dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.**

**Keterangan**

Y<sub>1</sub> = Pertumbuhan ekonomi

Y<sub>2</sub> = Kesejahteraan masyarakat

X<sub>1</sub> = Investasi swasta

X<sub>2</sub> = Belanja modal

e<sub>1</sub>, e<sub>2</sub> = Nilai standar error

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub>, b<sub>3</sub>, b<sub>4</sub>, b<sub>5</sub> = koefisien masing-masing variable

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis deskriptif**

Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang



telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugyiono, 2017: 232).

**Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif Investasi Swasta, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat**

	<b>Investasi Swasta</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Pertumbuhan ekonomi</b>	<b>IPM</b>
N	45	45	45	45
Minimum	15	70	5,08	64,01
Maksimum	15.728	1241	7,00	83,30
Mean	2220,67	305,82	6,0382	72,7300
Std. Deviation	3430,278	277,104	0,48693	5,53786

Berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa variabel investasi swasta memiliki nilai minimum sebesar 15 milyar rupiah dan nilai maksimumnya adalah 15.728 milyar rupiah dengan rata-rata sebesar 2.220,67 milyar rupiah dan standar deviasiasi memiliki nilai sebesar 3.430,278 milyar rupiah. Variabel belanja modal memiliki nilai minimum sebesar 70 milyar rupiah dan nilai maksimumnya sebesar 1.241 milyar rupiah dengan rata-rata sebesar 305,82 milyar rupiah dan standar deviasiasinya sebesar 277,104 milyar rupiah. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 5,08 persen dan nilai maksimum sebesar 7,00 persen dengan rata-rata sebesar 6,0382 persen dan standar deviasiasinya sebesar 0,48693 persen. Variabel yang terakhir adalah kesejahteraan masyarakat yang diukung dengan nilai IPM dimana variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 64,01 poin dan nilai maksimumnya sebesar 83,30 poin degan rata-rata sebesar 72,73 poin dan standar deviasiasinya sebesar 5,53786 poin.

### **Pengaruh Langsung**

#### **1) Pengaruh langsung investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali**

Nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,072 dengan signifikansi sebesar 0,314 > alpha (0,05) maka  $H_0$  diterima, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi swasta secara langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Investasi swasta tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena investasi swasta yang ditanamkan di Provinsi Bali lebih mengarah kepada penciptaan lapangan kerja dan peyerapan tenaga kerja, disamping itu investasi yang ditanamkan lebih kepada obligasi maupun saham sehingga tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Kuncoro (2010) investasi swasta yang di dalamnya terdapat penanaman modal asing dalam jangka panjang (kurun waktu 5-20 tahun) hanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jayanthi dan Arka (2019) yang menyatakan investasi secara langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

#### **2) Pengaruh langsung belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali**

Nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,316 dengan signifikans sebesar 0,020 < alpha (0,05) maka  $H_0$  ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belanja modal secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali. Artinya bahwa, belanja

modal yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki pengaruh yang positif dalam pertumbuhan ekonomi, dimana belanja modal yang meningkat mampu meningkatkan perekonomian. Belanja modal yang dapat bersentuhan langsung dengan pelayanan publik serta mempunyai sifat yang produktif akan merangsang terjadinya kegiatan perekonomian sehingga pertumbuhan ekonomi bisa terjadi. Pada era desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam mengalokasikan belanja modal secara bertahap, pengalokasian belanja modal secara bertahap mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Kusuma, 2016). Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kompiang dan Budiana (2015) dimana belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2013. Chinweoke dan Okeoma (2014) serta Ardiansyah (2016) juga mengatakan hal yang sama dimana belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian lainnya, Kim (1997), Adams (2009) juga menyatakan bahwa belanja modal (investasi pemerintah daerah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **3) Pengaruh langsung investasi swasta terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali**

Nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,422 dengan signifikansi sebesar  $0,000 < \alpha (0,05)$  maka  $H_0$  ditolak, dengan demikian investasi swasta secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Artinya semakin tinggi investasi swasta di suatu daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Investasi

swasta memberikan peran penting dalam peningkatan lapangan pekerjaan yang merupakan sumber dari pendapatan masyarakat, oleh karena itu dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang merupakan komponen dari kesejahteraan masyarakat bisa di capai oleh masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Krismajaya dan Dewi (2019) dimana Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Pratama dan Darsana (2019) investasi berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota 2011-2016 di Provinsi Bali.

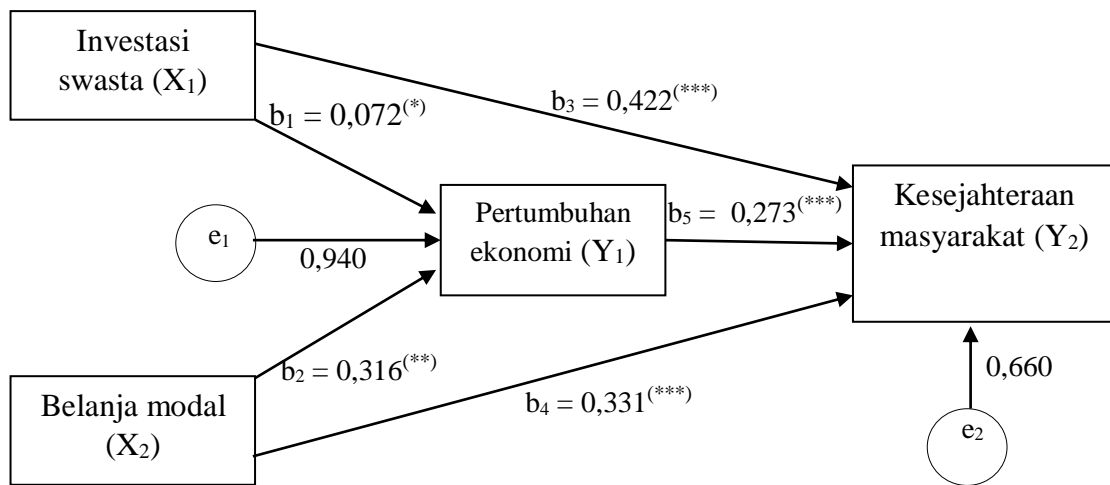
#### **4) Pengaruh langsung belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali**

Nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,331 dengan signifikansi sebesar  $0,0025 < \alpha (0,05)$  maka  $H_0$  ditolak, dengan demikian belanja modal secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh Utami dan Indrajaya (2019) dimana belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil yang sama dalam penelitian Kusreni dan Suhab (2009) juga menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan pada kesejahteraan masyarakat, ini dapat diartikan bahwa angka IPM yang tinggi adalah cerminan dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang dapat dipicu dengan meningkatnya belanja modal untuk penyediaan fasilitas-fasilitas

pendidikan, kesehatan serta perekonomian, dimana indikator pendidikan, kesehatan dan perekonomian merupakan indikator penting dalam kesejahteraan masyarakat.

**5) Pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali**

Nilai *standardized coefficients beta* sebesar 0,271 dengan signifikansi sebesar  $0,0085 < \alpha (0,05)$  maka  $H_0$  ditolak, dengan demikian secara langsung pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh KOMPIANG dan BUDIANA (2015) dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan indeks pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2008-2013. Hasil yang sama dalam penelitian BEATI (2013) juga menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia yang merupakan indikator kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah tahun 2007-2011. ARTANA dan ARKA (2015) juga menyatakan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi saling berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat apabila pertumbuhan ekonomi meningkat maka tingkat pendapatan masyarakat juga akan meningkat, selain itu dari peningkatan pendapatan yang terjadi, masyarakat akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga akses terhadap komponen kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan bisa dicapai oleh masyarakat..



**Gambar 2 Koefisien Jalur Hubungan Antar Variabel**

Keterangan:

- \* = Tidak signifikan
- \*\* = Signifikan
- \*\*\* = Sangat signifikan

Berdasarkan Gambar 2 dapat dilihat bahwa variabel yang paling besar berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah Belanja modal dengan koefisien jalur sebesar 0,316, sedangkan investasi swasta memiliki koefisien jalur sebesar 0,072. Sedangkan, variabel yang paling besar berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah variabel investasi swasta dengan koefisien jalur sebesar 0,422, yang kedua adalah variabel belanja modal dengan koefisien jalur sebesar 0,331 dan yang terakhir adalah variabel pertumbuhan ekonomi dengan koefisien jalur sebesar 0,273.

#### **Nilai koefisien determinasi total**

Terdapat indikator yang digunakan untuk memeriksa validitas model, indikator tersebut yaitu koefisien determinasi total yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$R_m^2 = 1 - (e_1^2 + e_2^2)$$

$$R_m^2 = 1 - \{(0,940)^2 + (0,660)^2\}$$

$$R_m^2 = 1 - \{(0,8836) + (0,4356)\}$$

$$R_m^2 = 1 - 0,384$$

$$R_m^2 = 0,615$$

Keterangan:

$R_m^2$  = koefisien determinasi

$e_1, e_2$  = nilai kekeliruan taksiran standar

koefisien determinasi total sebesar 0,615 mempunyai arti bahwa sebesar 61,5 persen informasi yang terkandung dapat dijelaskan oleh model yang terbentuk, sisanya yaitu 38,5 persen dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang terbentuk.

### **Pengaruh tidak langsung**

#### **1) Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel *intervening* dari pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali**

Untuk bisa mengetahui bahwa variabel pertumbuhan ekonomi merupakan variabel *intervening* pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali dengan cara menghitung nilai z dengan rumus sebagai berikut.

$$Z = \frac{b_2 b_5}{S_{b_2 b_5}}$$

Koefisien  $S_{b_2 b_5}$  diperoleh dengan cara dihitung dengan rumus berikut ini:

$$S_{b_2 b_5} = \sqrt{b_5^2 s_{b_2}^2 + b_2^2 s_{b_5}^2}$$

$$S_{b_2 b_5} = \sqrt{(3,100)^2(0)^2 + (0,001)^2(1,246)^2}$$

$$S_{b_2b_5} = \sqrt{0 + (0,000001)(1,552516)}$$

$$S_{b_2b_5} = \sqrt{0,000001552516}$$

$$S_{b_2b_5} = 0,001245$$

untuk menguji signifikansi variabel *intervening* harus menghitung nilai z dari koefisien  $S_{b_2b_5}$  dengan rumus sebagai berikut:

$$Z = \frac{b_2 b_5}{S_{b_2b_5}}$$

$$Z = \frac{(0,001)(3,100)}{0,001246}$$

$$Z = \frac{0,0031}{0,001246}$$

$$Z = 2,48$$

Oleh karena nilai  $Z_{hitung}$  sebesar  $2,48 > Z_{tabel}$  1,96 maka  $H_0$  ditolak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variable *intervening* pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Krismajaya dan Martini (2019) yang menyatakan belanja modal memiliki pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi. Belanja modal memiliki efek langsung maupun tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Belanja modal berkaitan dengan pengadaan fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya sehingga jika belanja modal bisa tepat sasaran maka akan meningkatkan kegiatan ekonomi di wilayah tersebut sehingga dengan meningkatnya kegiatan ekonomi tentu pendapatan perkapita masyarakat juga akan meningkat. Meningkatnya pendapatan perkapita juga akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dimana jika pendapatan meningkat akses seseorang untuk memperoleh komponen kesejahteraan



masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan bisa dicapai. Oleh karena itu, belanja modal selain bisa berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali, juga bisa berpengaruh tidak langsung dengan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali melalui pertumbuhan ekonomi.

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Implikasi kebijakan yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh investasi dan belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali dijelaskan sebagai berikut.

Investasi swasta memiliki pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. dengan adanya investasi swasta diharapkan bisa memperluas lapangan pekerjaan agar masyarakat bisa terserap didalamnya, dengan demikian pendapatan masyarakat bisa meningkat dan akses terhadap kesehatan dan pendidikan yang merupakan komponen dari kesejahteraan masyarakat bisa di capai. Oleh karena itu pemerintah kabupaten/kota harus membuat iklim investasi yang kondusif sehingga investor mau menanamkan modalnya di daerah tersebut dengan catatan investasi yang ditanamkan harus memberikan dampak terhadap masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Oleh karena itu, Belanja modal harus diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti fasilitas pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya yang nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. kesejahteraan masyarakat bisa tercapai apabila masyarakat mempunyai akses terhadap kesehatan, pendidikan dan pendapatan. selain itu, dengan dibuatkan sarana dan prasarana tersebut diharapkan mampu menarik minat investor swasta untuk ikut menanamkan modalnya.

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan.

- 1) Investasi swasta secara langsung berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali, sedangkan belanja modal secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 2) Investasi swasta, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.
- 3) Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel *intervening* pengaruh belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali. Sedangkan pertumbuhan ekonomi bukan sebagai variabel *intervening* pengaruh investasi swasta terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali

### **Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan maka dapat diajukan saran sebagai berikut.

- 1) Investasi swasta memberikan pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali, oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali maupun pemerintah kabupaten/kota diharapkan mampu menyeimbangkan nilai investasi antar kabupaten/kota di Provinsi Bali, tujuannya adalah supaya tidak ada wilayah yang memiliki nilai investasi yang sangat tinggi dan wilayah dengan nilai investasi yang sangat rendah, hal tersebut tentu akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali serta disparitas kesejahteraan antar kabupaten/kota di Provinsi Bali bisa di perkecil.
- 2) Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan dapat meningkatkan investasi dalam negeri maupun investasi asing, dengan cara menciptakan suasana investasi yang kondusif, membuat fasilitas-fasilitas yang mampu meningkatkan investasi seperti infrastruktur yang memadai, adanya

kemudahan perijinan dalam proses penanaman modal, sehingga harapannya nilai penanaman modal dapat semakin meningkat di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat kabupaten/kota di Provinsi Bali.

## REFERENSI

- Adams, Samuel. (2009). Can foreign direct investment (FDI) help to promote growth in Africa African. *Journal of Business Management*. Vol 3 (5)
- Ardhansyah, Putra. (2016). Pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan dana perimbangan sebagai pemoderasi di kabupaten/kota Sumatera Utara. *Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen*, 3 (1), 12-25.
- Arsyad, Lincolin. (2015). *Ekonomi Pembangunan: Edisi keempat*. Yogyakarta STIE YKPN.
- Artana, I KM Oka. (2015). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. *JEKT* 8[1].
- Awandari, putu. (2016). Pengaruh infrastruktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui kesempatan kerja. *E-jurnal EP Unud* 5[12]
- Baron, R.M., and Kenny, D.A. (1986). The moderation-mediator variable distinction in social psychological research. *Journal of personality and social psychology*. 51(6). pp 1173-1182.
- Baeti, Nur. (2013). Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal* 2 (3).
- Batarseh, I.A and Ananzeh, N.E. (2015). The causal relationship among foreign direct investment, domestic saving and economic growth in Jordan during the period 1975-2013. *International journal of business and management*. 10(1). pp:73-79.
- Chinweoke, Nwaeze and Okeoma Paschal. (2014). Impact Of Government Expenditure On Nigeria's Economic Growth 1992-2011. *The MacrotHEME Review* 3(7).
- Ding, Hong. (2014). *Economic growth and welfare state: A Debate of econometrics*. American research institute. *International journal* Vol. 2(2), pp, 165-196.

- Dalamagas, Basil. (2010). Public Sector and Economic Growth: The Greek Experience. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 32,277-288.
- Erwidodo. (2014). The social welfare impact of indonesia dairy policies. *E-jurnal Bulletin of Indonesian economic studies*.
- Hukom, alexandra. (2014). Hubungan ketenagakerjaan dan perubahan struktur ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. *JEKT* 7 [2].
- Imron, Choirunnasih. (2018). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur 2011-2016. *Skripsi sarjana jurusan ilmu eknomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Jayanthi, N.K.E dan Arka, S (2019). Analisis pengaruh investasi, ekspor, inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. 8 [9]: 2102 – 2132
- Kamala, Seyed. (2015). analysis of social welfare in Iran. *Journal of International and Comparative Social Policy*. Vol. 31, No. 3. PP 271.
- Kim, Sung Tai. (1997). The relation of home investment to unemployment. *JSTOR The Economic Journal*, Vol 41, No. 162.
- Kompiang, G.B dan Budiana, D.N. (2015). Pengaruh belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*. 4 [10]: 1276-1303
- Krismajaya, I.P dan Dewi, N.P.M. (2019). Pengaruh belanja daerah dan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Bali. *E-jurnal EP*. 8[6]: 1390-1442.
- Kuncoro, mudrajad. (2010). *Ekonomi Pembangunan teori masalah dan kebijakan*. edisi kelima. Penerbit Unit Penerbit Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta.
- Kunle, Adeleke, Olowe dan Oluwafolakemi. (2014). Impact of Foreign Direct Investment on Nigeria Economics Growth. *International Journal of Academic Research*. 4 (8), pp: 234-242.
- Kusuma, Hendra. (2016). Desentralisasi fiscal dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *JEKT*, 9[1]: 1-11.
- Meylina, Indah dan Kuncara. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia . *Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis* Vol.1 No. 1
- Mirza, Denni Sulistio. (2012). Pengaruh kemiskinan , pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia di jawa tengah 2006-

2009. *Jurnal ekonomi pembangunan*, fakultas ekonomi, universitas negeri semarang, EDAJ. Vol 1: hal 1-15.
- Oluwatobi, Stephen O. (2011). Government Expenditure on Human Capital Development Implications for Economic Growth in Nigeria. *Journal of Sustainable Development*. Vol. 4 No.3.
- Pratama, A.A.G.K dan Darsana, I.B (2019). Pengaruh kemiskinan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *E-Jurnal EP Unud*, 8 [6]: 1300-1330.
- Ramirez, A. G, Rannis, and F. Stewart. (2000). Economic Growth and Human Capital. *QEH Journal* No.18.
- Ranis, G. (2004). Human developmet and economic growth. Center discussion paper of yale university. No 887.
- Rustariyuni, Surya D. Pengaruh Gini Ratio, Pengeluaran Non Makanan PerKapita, Belanja Daerah Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2004-2012. *Piramida* Vol. X No. 1: 4-55.
- Saragih, J Hartasi. (2009). Analisis faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ( studi komperatif: Kabupaten tapanuli selatan dan Kabuoaten Langkat). *Jurnal Universitas Sumatra Utara*.
- Setiawan, G B. (2015). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 4 [10].
- Stanton, Elizabeth A. (2007). The Human Development Index: A History. Working Paper Series Number 127: Global Development and Environment Institute Tufts University.
- Subandi. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. Cetakan keempat. Bandung: alfabeta
- Suciati, A.P., Bhudi, M.K.S., dan Jayastra, K. (2015). Pegaaruh Jumlah Penduduk, Daana Perimbangan dan Investasi pada Kesejahteraan Masyarakat Melalui Balanja Langkung Pada Kabupate/kota di Provinsi Bali Tahun 2007-2012. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 20(2).
- Sumanto, agus dan Effendi. (2015). The effect of Governmt capital expenditure and privet investmen on social welfare. *E-jurnal economic of sustainable developmet*. hal: 204.
- Sumarto, S., dan Silvia, LD. (2014) does economic growth really benefit the poor? income distribution dynamics and pro-poor growth in Indonesia. *Bulletin Indonesian Economic Studie*. 50(2). pp: 227-242.
- Sunariani, Ni Nym *et all*. (2014). Kontribusi Pelaksanaan Ritual Hindu Terhadap Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Badung

Provinsi Bali (Studi Kasus Mlaspas dan Ngenteg Linggih di Pura Pasek Preteka Desa Abiansemal). *JEKT* 7[2] : 145-154.

Tara, Elmalia dan Kusreni. (2014). The influence of regional revenue towards economic growth, employment and social welfare in palangkaraya, central kalimantan province. *European Journal of Business and Management*. Vol.6, No.8.

Taufik, Muhammad. (2014). Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *JEKT* 7[2] ; 90-101.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2004). *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*. Edisi kedelapan. Jakarta: Erlangga

Todaro. (2011). *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*. Edisi kesebelas/jilid 1. Jakarta: Erlangga.

Utami, D N dan Indrajaya G B. (2019). Pengaruh pad dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 8 [10]: 2195 – 2225.